

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG  
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PROVINSI DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DI BIDANG  
 PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DI  
 BIDANG PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Provinsi	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.	Aceh	Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM) Sumatera Barat
4.	Riau	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau
5.	Jambi	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPM dan P2TD) Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kalimantan Barat	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BPMDP) Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

		<b>(BKPM) Provinsi Kalimantan Selatan</b>
15.	Kalimantan Timur	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
16.	Banten	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Banten
17.	Jawa Barat	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat
18.	Jawa Tengah	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah
19.	Sulawesi Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Sulawesi Utara
20.	Gorontalo	Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi Gorontalo
21.	Sulawesi Tenggara	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	Sulawesi Tengah	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Tengah
23.	Sulawesi Selatan	Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan
24.	Sulawesi Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM & P2T) Provinsi Sulawesi Barat
25.	Jawa Timur	Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur
26.	Bali	Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali
27.	Nusa Tenggara Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat
28.	Nusa Tenggara Timur	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur
29.	Maluku	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Maluku
30.	Maluku Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Maluku Utara
31.	Papua Barat	Biro Perekonomian dan Investasi, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat
32.	Papua	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIC INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI





LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG  
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2013

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM  
 NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN SEKTOR

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2013

Lokasi:

No	Sektor	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki-laki	Perempuan		
I	Sektor Primer							
	Tanaman pangan & perkebunan							
	Peternakan							
	Kehutanan							
	Perikanan							
	Pertambangan							
II	Sektor Sekunder							
	Industri makanan							
	Industri tekstil							
	Industri barang dari kulit & alas kaki							
	Industri kayu							
	Industri kertas & percetakan							
	Industri kimia & farmasi							
	Industri karet & plastik							
	Industri mineral non-logam							
	Industri logam, mesik							

	& elektronika							
	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam							
	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain							
III	Sektor Tersier							
	Listrik, gas dan air							
	Konstruksi							
	Perdagangan & reparasi							
	Hotel & restoran							
	Transportasi, gudang & komunikasi							
	Perumahan, kawasan industri & perkantoran							
	Jasa lainnya							
	Jumlah							

- \*) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI







LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG  
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2013

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING  
 DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN SEKTOR USAHA

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2013

Lokasi:.....

No	Sektor	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki-laki	Perempuan		
I	Sektor Primer							
	Tanaman pangan & perkebunan							
	Peternakan							
	Kehutanan							
	Perikanan							
	Pertambangan							
II	Sektor Sekunder							
	Industri makanan							
	Industri tekstil							
	Industri barang dari kulit & alas kaki							
	Industri kayu							
	Industri kertas & percetakan							
	Industri kimia & farmasi							
	Industri karet & plastik							
	Industri mineral non-logam							
	Industri logam, mesik & elektronika							
	Industri							

	instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam							
	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain							
III	Sektor Tersier							
	Listrik, gas dan air							
	Konstruksi							
	Perdagangan & reparasi							
	Hotel & restoran							
	Transportasi, gudang & komunikasi							
	Perumahan, kawasan industri & perkantoran							
	Jasa lainnya							
	Jumlah							

**Keterangan:**

- \* ) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- \*\* ) Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**



